Journal homepage: www.elastisitas.unram.ac.id

## Vol. 5, No. 2, September 2023

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020-2022

## Astrid Wirawati<sup>1\*</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>, Sujadi<sup>3</sup>

1,2,3Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

\*Corresponding Author: astridwirawati109@gmail.com

### Info Artikel ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyerapan Anggaran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020-2022. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan sumber data primer melalui pembagian kuesioner ke beberapa responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian diambil masing-masing 6 responden pada 6 satuan kerja dengan anggaran APBD terbesar, sehingga total terdapat 36 responden. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat uji statistik SPSS 16.0. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y), sedangkan variabel pengadaan barang dan jasa (X2), sumber daya manusia (X3), serta pemanfaatan teknologi informasi (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y). Secara simultan variabel perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

#### ABSTRACT

#### Keywords:

Planning, Procurement of Goods and Services, Human Resources, Utilization of Information Technology, Budgeting This study aims to ascertain the impact of planning, procurement of goods and services, human resources, and utilization of information technology on budget absorption in the regional work units of the NTB Provincial Government in 2020-2022. The type of research conducted is quantitative research with an associative approach using primary data sources through the distribution of questionnaires to several respondents. The sampling technique used purposive sampling. The research sample was taken 6 respondents each in 6 work units with the largest APBD budget, so that in total there were 36 respondents. The analysis technique uses multiple linear regression analysis with the SPSS 16.0 statistical test tool. The results of research with multiple linear regression analysis show that partially the planning variable (X1) has a positive and significant effect on budget absorption (Y), while the variable procurement of goods and services (X2), human resources (X3), and utilization of information technology (X4) have no significant effect on budget absorption (Y). Simultaneously, the variables of planning, procurement of goods and services, human resources, and utilization of information technology have a significant effect on budget absorption.

### 1. PENDAHULUAN

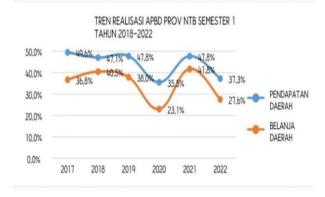
Hakikat dari anggaran kas ialah merencanakan arus kas masuk beserta arus kas sehingga mampu mendukung keluar. kelancaran operasional suatu organisasi. Anggaran kas menghimpun informasi rencana arus kas masuk yang bermuara dari pendapatan dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja serta pengeluaran lainnya. Dengan demikian, kalkulasi arus masuk harus seimbang dengan kalkulasi arus keluar (matching) supaya terhindar dari terdapatnya kas menganggur (iddle money) ataupun kekurangan kas (cash shortfall).

Negara-negara kategori berkembang salah-Indonesia memiliki satunya masalah penyerapan anggaran atau istilah lain disebut "slow and back loaded expenditure', hal tersebut dituturkan langsung oleh World Bank tahun 2015. Fenomena klasik yang terus berulang setiap tahunnya yakni perihal minim dan lambannya serapan anggaran yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya kecenderungan persentase penyerapan anggaran yang kurang dari 75 persen pada akhir triwulan ke-3. Situasi tersebut menjadi perundingan hangat pemerintahan, dikalangan masyarakat, akademisi, dan media massa. Menurut Suwarni dalam (Lestari & Yuliani, 2022) salah satu permasalahan dalam suatu anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun menumpuk di akhir tahun menyebabkan tidak meratanya penyerapan anggaran. Selain masalah serapan anggaran, masalah yang dihadapi oleh NTB adalah realisasi pendapatan asli daerah yang selalu di bawah target, setidaknya sejak 3 tahun terakhir tahun 2020-2022 (Hak dan Marlina, 2023).

Fenomena klasik "slow-back loaded" terjadi di Provinsi NTB di era pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022. Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kinerja dari realisasi anggaran Provinsi NTB semester 1 tahun 2022 mengalami penurunan dan memiliki kondisi yang persis saat pandemi pada tahun 2020. Realisasi pendapatan daerah menjangkau 37,3 persen atau senilai Rp2 triliun dari sasaran

sebesar Rp5,39 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah hanya terserap sebesar 27,6 persen dari sasaran senilai Rp5,96 triliun.

Adapun data tren realisasi APBD Provinsi NTB semester 1 tahun 2018-2022 sebagai berikut:



**Gambar 1.** Tren Realisasi APBD Provinsi NTB Semester I Tahun 2018-2022 (FITRA NTB)

Di sisi lain, pada tahun 2022 penyerapan anggaran APBD oleh OPD Pemerintah Provinsi NTB dinyatakan merosot dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan, realisasi sampai 9 November 2022 hanya menjangkau 64,94 persen dari sasaran 90 persen atau sekitar Rp3,87 triliun dari anggaran Rp5,96 (Lombokpost.jawapos.com, triliun 2022).

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemerintah Provinsi NTB oleh OPD menunjukkan progres serapan dengan pola yang relatif sama yaitu rendah di awal triwulan dan periode tersibuk adalah triwulan ke-4 dengan kecendrungan persentase penyerapan yang melonjak signifikan. Idealnya penyerapan anggaran mampu terjadwal yaitu 25 persen pada triwulan ke-1, 50 persen pada triwulan ke-2, 75 persen pada triwulan ke-3, dan 100 persen pada triwulan ke-4 (BPKP, 2011). Adapun data pendapatan daerah serta realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020-2022 oleh OPD sebagai berikut:

#### Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No. 2, September 2023

**Tabel 1.** Data Pendapatan Daerah Serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020-2022

		TAHUN			
	URAIAN	2020	2021	2022	
TRIWULAN	Pendapatan Realisasi	5.405.179.978.133 5.174.293.221.665 96,00%	5.739.963.964.315 5.326.932.790.703,61 92,80%	5.670.486.399.401 5.302.613.771.985,77 93,51%	
I (Jan-Mar)	Pagu Realisasi Keu. (%) Fisik (%)	5.713.60.473.107 626.337.769.055 10.96% 13.2%	5.528.931.855.427 540.226.810.740 9.77% 12.44%	5.961.577.280.000 703.786.719.633 11.81% 14.46%	
II (Apr-Jun)	Pagu Realisasi Keu. (%) Fisik (%)	4.786.277.447563 1.468.927.364.134 30.69% 48.52%	5.460.824.188.427 2.222.508.157.531 40.7% 48.82%	5.976.159.420.200 1.651.821.567.193 27.64% 33.99%	
III (Jul-Sep)	Pagu Realisasi Keu. (%) Fisik (%)	4.809.923.394.718 1.784.598.959.659 37.1% 55.74%	5.528.931.855.427 3.335.371.400.230 60.33% 73.29%	5.961.577.280.000 2.980.788.840.675 50.87% 64.59%	
IV (Okt-Des)	Pagu Realisasi Keu. (%) Fisik (%)	5.427.292.972.474 5.140.172.815.288 94.71% 99.24%	6.380.316.797.911 5.523.462.401.386 86.57% 96.48%	6.317.143.781.896 5.740.517.954.519 90.87% 95.59%	

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTB (Data Diolah

Berdasarkan penelitian terdahulu masih mengalami kesenjangan hasil penelitian, berikut beberapa faktor di dalam penelitian ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian oleh Ramadhani & Setiawan, (2019) menyebutkan salah satu faktor yaitu perencanaan berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran, karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan, maka kegiatan/program yang ditargetkan akan optimal. Hasil berjalan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Setiawan, (2019) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tofani et al., (2020), Kennedy et al, (2020), Fitriyani et al., (2022) dan Dan et al., (2022) menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian oleh Wardayani et al., (2022) dan Lestari & Yuliani, (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan angggaran.

Penelitian oleh Wardayani et al., (2022) menyatakan faktor pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran OPD Kota Prabumulih selama Covid-19. Penelitian tersebut didukung oleh Ramadhani & Setiawan, (2019) dan Tofani et al., (2020) menyatakan bahwa

pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Sanjaya et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian oleh Dan et al.. menyatakan salah satu faktor yaitu sumber dava berpengaruh terhadap manusia penyerapan **APBD** Pemerintah anggaran Kabupaten Pasaman. Penelitian tersebut didukung oleh Tofani et al., (2020), Kennedy et al, (2020), dan Lestari & Yuliani, (2022) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Ramadhani & Setiawan, (2019) yang menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian oleh Basri et al., bahwa penggunaan teknologi menuturkan informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah studi realokasi dan refocusing anggaran Covid-19. Penelitian tersebut didukung oleh Tofani et al., (2020), namun ditolak oleh penelitian Mantiri et al., (2019) yang menyatakan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan secara simultan pengaruh dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020-2022.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan Reed, (1983) dalam (Ramadhani & Setiawan, 2019) Teori Stakeholder adalah "Any indentifible group or individual who can affect the achievement of an organization's objectives, or is affected by the achievement of an organization's objectives". Menurut Ghozali dan Chairiri dalam (Ramadhani & Setiawan, 2019) Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya contohnya seperti pemegang konsumen. kreditor. pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Pemerintahan adalah bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial vang ada. Situasi tersebut membangun sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para stakeholder, yang dapat didefinisikan bahwa pemerintah harus menjalankan perannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder maupun pemerintahan sendiri dalam sebuah sistem sosial.

#### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Data vang sebelumnya bersifat kualitatif diberi skor melalui skala likert 5 poin untuk dapat mengukur dan menjawab rumusan masalah. Data kuantitatif merupakan metode penelitian berlandaskan positivistic konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). Penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan ataupun pengaruh dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019).

Pemilihan sampel mempertimbangkan proporsi terhadap total belanja publik yaitu pendidikan, kesehatan. pada bidang infrastruktur, serta pertanian dan perkebunan mampu mewakili sebagian yang besar informasi mengenai sumber daya vang untuk menyediakan pengadaan digunakan barang dan jasa publik. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling berdasarkan kriteria berikut:

- a) Satuan kerja dengan anggaran APBD terbesar Pemerintah Provinsi NTB.
- b) Aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yaitu kepala dinas, kepala sub bagian program, kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian

keuangan, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, dan kepala bidang dari masing-masing OPD, serta aparatur yang terlibat dalam proses penatausahaan.

c) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

# Prosedur Analisis Data Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji T (Uji Parsial), Uji F (Uji Kelayakan Model), dan Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Kualitas Data

### a) Uji Validitas

Validitas setiap variabel baik Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Penyerapan Anggaran memperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Diketahui nilai r tabel sebesar 0,278 dan nilai r hitung (*Pearson Correlation*) lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

### b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas variabel Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Penyerapan Anggaran dinyatakan reliabel karena memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60.

# Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a) Uii Normalitas

Residual telah berdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yang ditunjukkan oleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,465 > 0,05.

### b) Uji Multikolinearitas

Setiap variabel bebas mempunyai nilai VIF < 10 dan *tolerance value* > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Nilai signifikansi setiap variabel independen pada uji *Spearman's rho* lebih besar dari nilai absolut residualnya atau nilai sig. (2-tailed) > 0,05 artinya bahwa setiap variabel independen tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Diperoleh bentuk model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + e$$

$$Y = 0.935 + 0.512X1 - 0.239X2 + 0.075X3 + 0.187X4 + e$$

#### Keterangan:

Y = Penyerapan anggaran

 $\alpha = \text{Konstanta} (5\%)$ 

X1 = Perencanaan

X2 = Pengadaan barang dan jasa

X3 = Sumber daya manusia

X4 = Pemanfaatan teknologi informasi

 $\beta 1$  = Koefisiensi perencanaan

 $\beta$ 2 = Koefisiensi pengadaan barang dan jasa

 $\beta$ 3 = Koefisiensi SDM

 $\beta 4 = Koefisiensi$  pemanfaatan teknologi informasi

e = Standard of error

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

## a) Konstanta (α)

Konstanta bernilai positif pada seluruh variabel, hal ini mengindikasi bahwa persamaan regresi linier berganda tersebut mempunyai hubungan searah, artinya penyerapan anggaran akan meningkat seiring meningkatnya perencanaan (X1), pengadaan

barang dan jasa (X2), SDM (X3), dan pemanfaatan teknologi informasi (X4). Nilai konstanta bernilai 0,935 yang bermakna jika variabel independen dalam model penelitian bernilai nol maka penyerapan anggaran dapat terjadi sebesar nilai konstanta.

# b) Perencanaan (X1) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 yang artinya variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan semakin tinggi perencanaan akan semakin tinggi penyerapan anggaran. Demikian sebaliknya, semakin menurunnya perencanaan akan semakin menurun penyerapan anggaran.

## c) Pengadaan Barang dan Jasa (X2) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,415 > 0,05 artinya variabel pengadaan barang dan iasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh negatif menunjukkan semakin rendah pengadaan barang dan jasa maka akan semakin tinggi penyerapan anggaran. Demikian sebaliknya, semakin tinggi pengadaan barang dan jasa maka akan semakin menurun penyerapan anggaran.

## d) Sumber Daya Manusia (X3) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,788 > 0,05 artinya variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan semakin tinggi sumber daya manusia akan semakin tinggi juga penyerapan anggaran. Demikian sebaliknya, semakin menurunnya sumber daya manusia maka akan semakin menurun penyerapan anggaran.

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,505 > 0,05 yang variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi akan semakin tinggi penyerapan anggaran. Demikian sebaliknya, semakin menurunnya pemanfaatan teknologi informasi semakin menurun juga penyerapan anggaran.

### **Pengujian Hipotesis**

### a) Uji T

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan (X1) memiliki t hitung 2,49 > t tabel (1,69) artinya perencanaan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y), sedangkan pengadaan barang dan jasa (X2), SDM (X3), serta pemanfaatan teknologi informasi (X4) memiliki nilai t hitung < t tabel (1,69) artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y).

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.935	4.865		0.192	0.849
Pernc	0.512	0.205	0.619	2.493	0.018
1 PBJ	-0.239	0.289	-0.246	-0.827	0.415
SDM	0.075	0.276	0.1	0.271	0.788
PTI	0.187	0.277	0.159	0.674	0.505

a. Dependent Variable: PA

Gambar 2. Uji T

## b) Uji F

Berdasarkan gambar 3 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai f hitung 5,29 > f tabel 2,67 dan nilai sig 0,00 < 0,05 artinya bahwa secara serentak seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

ANOVA <sup>b</sup>
--------------------

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	154.862	4	38.715	5.292	.002ª
Residual	226.777	31	7.315		
Total	381.639	35			

a. Predictors: (Constant), PTI, Pernc, PBJ, SDM

Gambar 3. Uji F

## c) Uii Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,406. Artinya variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 40,6% dan sisanya sebesar 59,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.637ª	0.406	0.329	2.705

a. Predictors: (Constant), PTI, Pernc, PBJ, SDM

Gambar 4. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Pembahasan

#### 1. Perencanaan

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0.018 < 0.05 dan t hitung sebesar 2,493 > 1,693 yang artinya variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berpengaruh menunjukkan positif semakin perencanaan maka akan semakin tinggi penyerapan anggaran. Sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden terhadap variabel perencanaan yang dijalankan di satuan kerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata skor total responden sebesar 4,30 atau tingkat capaian responden senilai 86%. Sedangkan untuk variabel penyerapan anggaran rata-rata responden menjawab pada skala 3,9 yang satker mampu mencapai penyerapan anggaran lebih dari 95%. Hal ini bermakna bahwa perencanaan anggaran sudah berlangsung dengan baik sehingga tidak akan menghambat tingkat penyerapan anggaran, pengelola anggaran dalam merencanakan program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran sudah berlangsung dengan baik, sehingga penyerapan anggaran mampu mencapai sasaran.

Hasil penelitian ini mendukung konsep pada teori stakeholder yang menjelaskan pemerintah daerah memiliki beberapa stakeholder yang mempunyai hubungan timbal balik masingmasing pihak yang akan berdampak satu dengan lainnya dalam menggapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai stakeholder terhadap pembangunan di daerah memiliki pengaruh cukup signifikan, sehingga dengan terdapatnya sumber daya akan mampu memajukan pembangunan secara maksimal dengan pelaksanaan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal akan memperlancar pelaksanaan aktivitas/program yang pada akhirnya berimplikasi pada idealnya penyerapan anggaran di daerah.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian oleh Ramadhani dan Setiawan, (2019), Tofani et al., (2020), Kennedy et al., (2020), Fitriyani et al., (2022), dan Tasya et al.,(2022) menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wardayani et al., (2022), Lestari dan Yuliani, (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### 2. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,415 > 0,05 dan t hitung sebesar -0,287 < 1,693 artinya variabel pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berpengaruh negatif artinya semakin tinggi pengadaan barang dan jasa maka semakin rendah penyerapan anggaran. Sebaliknya, semakin rendah pengadaan barang dan jasa maka akan semakin tinggi penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden terhadap variabel pengadaan barang dan jasa yang dijalankan di satuan kerja masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata skor total responden sebesar 4,31 atau tingkat capaian responden sebesar 86,2%. Sedangkan untuk variabel penyerapan anggaran rata-rata

b. Dependent Variable: PA

responden menjawab pada skala 3,9 yang berarti mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95%. Tetapi dengan capaian responden dalam kategori baik ini tidak dapat membuktikan bahwa tinggi maupun pengadaan barang rendahnva iasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan tabulasi iawaban responden, masih terdapat jawaban responden belum mampu menerapkan waktu sesingkat-singkatnya serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap penetapan penggunaan dana pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, jawaban responden tersebut mengindikasi bahwa proses pengadaan belum dapat secepatnya dilaksanakan pada awal tahun sehingga dari penetapan penggunaan dana yang terlambat secara otomatis proses pengadaan barang dan jasa baru dimulai pengerjaannya pada pertengahan tahun yang tentunya akan berdampak pada penumpukan penyelesaian kegiatan/program yang telah direncanakan disisa triwulan yang akan berimplikasi pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Hasil penelitian ini menolak konsep pada Teori Stakeholder yang menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai stakeholder yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia/swakelola secara efisien dan efektif sehingga mempermudah penyerapan anggaran. Anggaran yang telah disahkan merupakan representasi dari apa yang diharapkan oleh rakyat dan manfaat serta hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat sesegera mungkin. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tinggi tak selamanya berdampak terhadap tingginya penyerapan anggaran di daerah. Berdasarkan data tender di LPSE tahun 2019, puncak dimulainya proses tender/seleksi Lembaga/Pemerintah Kementrian Daerah umumnya dilaksanakan pada bulan Mei yang menyebabkan penyerapan anggaran lamban. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan dilaksanakan terburu-buru akibat iasa ditetapkan terlambat maka akan terdapat banyak paket pekerjaan besar yang memakan

waktu lama dan baru dimulai pengerjaannya dipertengahan tahun lalu menumpuk di akhir berpotensi memperlambat realisasi anggaran, juga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan serta memperlambat pergerakan roda perekonomian daerah. Disamping itu, masih terdapat kasus diberbagai daerah termasuk di SKPD Pemerintah Provinsi NTB yang masih sering mengalami deviasi antara realisasi fisik dan keuangan yang disebabkan karena dari pihak ketiga/penyedia yang sudah selesai pekerjaannya tidak melakukan pembayaran per termin atau sesuai kemajuan fisik namun seringkali menagih pembayaran atau proses pencairan dana sekaligus dilakukan di akhir tahun yang pada akhirnya unit kerja harus disibukkan pada proses penyelesaian tagihan proyek/program kerja yang membutuhkan waktu cukup lama dan berpotensi mengganggu penyerapan anggaran.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya et al., (2018)yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat, serta dukung oleh penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) dan Tasya et al, (2022) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap tidak penyerapan Penelitian ini menolak anggaran. penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari dan Yuliani, (2022) dan Dan et al, (2022) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### 3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0.544 > 0.05 dan t hitung sebesar 0,613 < 1,693 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sumber dava manusia berpengaruh positif dan tidak mempengaruhi signifikan penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan semakin tinggi sumber daya manusia maka akan semakin tinggi juga penyerapan anggaran. Demikian sebaliknya, semakin menurunnya sumber daya manusia maka akan semakin menurun juga penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden terhadap variabel SDM yang ada di satuan kerja masing-masing responden menunjukkan kategori baik dengan rata-rata skor total sebesar 4,32 atau tingkat capaian responden senilai 86,4%. Sedangkan untuk variabel penyerapan anggaran rata-rata responden menjawab pada skala 3,9 yang berarti mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95%. Tetapi. dengan capaian responden dalam kategori baik ini tidak dapat membuktikan bahwa tinggi maupun rendahnya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ketidaksignifikanan hasil penelitian disebabkan karena berdasarkan jawaban responden masih terdapat responden yang menyatakan belum dapat menguasai ilmu penganggaran, keuangan dan ilmu lainnya, serta pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Penggunaan komputer dengan pengetahuan dan kompetensi yang kurang mendukung dari sumber daya manusia akan berdampak tidak terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

penelitian Temuan ini masih mendukung konsep sumber daya manusia pada teori stakeholder yaitu pemerintah sebagai stakeholder memiliki peranan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja vang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan yang direncanakan berjalan tanpa hambatan sehingga dapat tercapai. Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya.

Penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian vang telah dilakukan oleh (2019)dan Setiawan, Ramadhani vang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tofani et al., (2020), Kennedy et al., (2020), Lestari dan Yuliani, (2022) dan Dan et al, (2022) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,923 > 0,05 dan t hitung sebesar 0,098 < 1,693 artinya bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin tinggi penyerapan anggaran. Sebaliknya, semakin menurunnya pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin menurun juga penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden variabel pemanfaatan teknologi terhadap informasi, rata-rata skor total responden dengan nilai 4,26 atau Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 85,2% menunjukkan kategori baik. Sedangkan untuk variabel penyerapan anggaran rata-rata responden menjawab pada skala 3,9 yang berarti mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95%. Tetapi, dengan capaian responden dalam kategori baik ini tidak dapat membuktikan bahwa tinggi maupun rendahnya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ketidaksignifikanan hasil penelitian disebabkan karena berdasarkan tabulasi jawaban masih terdapat responden yang menyatakan bahwa di SKPD responden tidak memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. Keberadaan komputer yang kurang memadai di dalam unit kerja akan mengurangi efisiensi produktivitas, dan memperlambat proses administrasi dan pengolahan data penyelesaian pekerjaan/program yang telah direncanakan sebelumnya dan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini masih dapat mendukung pada teori stakeholder konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik masingmasing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan tertentu, pemerintah sebagai stakeholder vang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah. stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernva. Pemerintah sebagai stakeholder memiliki peranan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat spesialisasinya sehingga tidak mengganggu kegiatan/program yang telah dijabarkan dalam perencanaan sehingga mampu berjalan optimal. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang signifikan bagi Pemerintah maupun stakeholdernya terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas serta dapat pemerintah dalam mengambil membantu keputusan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tofani et al., (2020) dan Basri et al., (2021) menyatakan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. didukung oleh penelitian Namun dilakukan oleh Mantiri et al., (2019)yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

- a. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- b. Pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- c. SDM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- e. Secara serentak variabel perencanaan pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pemerintah dapat membuat regulasi batas minimal penyerapan anggaran daerah per semester, dan menegakkan sistem *reward* bagi unit kerja yang melakukan optimalisasi serapan anggaran serta *punishment* bagi unit kerja yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja.
- b. Bagi organisasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan DIPA secara periodik review mengendalikan mengoptimalkan serta revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan meningkatkan pada K/L, serta pemanfaatan teknologi informasi yaitu maupun kuantitas hardware. kualitas brainware dalam software, dan pengelolaan anggaran.
- penelitian Bagi selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian, serta menambahkan variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dikarenakan nilai R Square rendah sebesar 40,6%. Variabel seperti: pencatatan administrasi, regulasi, politik anggaran, dan variabel lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (*Doctoral dissertation*, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Basri, Y. M., Gusnardi, G., & Yasni, H. (2022). Government Budget Absorption: A Study on The Reallocation and Refocus of the COVID-19 Budget. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 6(2), 317-337
- Fitriyani, F., Nofianti, N., & Oktaviani, L. (2022).Budget Absorption: on Interaction of **Organizational** Budget **Planning** Commitment. Quality of Human Resources of The OPD City. Journal of Applied Serang Business. **Taxation** and **Economics** Research, 1(4), 416-426.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hak, M. B. U., & Marlina, N. (2023). The Contribution of Regional Tax to Regional Original Income of West Nusa Tenggara Province in 2018-2022. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1).
- Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya Manusia , Pengadaan Barang / Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. 648–663.
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 13(2), 108-117.
- Mantiri, R. ., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Universitas Sam Ratulangi Manado.Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(7), 67 –85.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019).
  Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran,
  Perencanaan Anggaran, Sumber Daya
  Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa
  Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
  Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
  Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710–
  726.
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 7(2), 188-199.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 6(3).
- Suhadak., et al. 2007. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah. Jawa Timur: Bayu Media.
- Syarah, F. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Wilayah KPPN I Di Kota Bandung (*Doctoral* dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Sugiyono, P. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alpabeta, Bandung.
- Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal. (2020). Analysis of the Factors That Affects the Budget Absorption in the Riau and Kepri Supreme Courts With Organisational Commitments as the Moderating Factor. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 165–182.
- Wardayani, K., Dewata, E., & Jauhari, H. Affecting Budget (2022).**Factors** Absorption Of **Expenditure** Local Apparatus Organization Prabumulih City Government During The Covid-19 Period. International Journal of Economics, and **Business** Accounting Research (IJEBAR), 6(3), 1966-1978.